

IMPLEMENTATION OF DPRD WEBSITE IN PUBLICIZING THE ACTIVITIES OF DPRD MEMBER IF PEKANBARU CITY

By: M. Eka Prasetya Hsb
m.ekaprasetyahsb@yahoo.com

Counsellor:
Genny Gustina Sari, M.Si.,M.I.Kom

Department of Communication – Public Relations
Faculty of Social and Political
University of Riau

Campus Bina Widya jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Phone/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Websites are pages of information sites that can be accessed quickly. It is important for local governments to provide websites that can meet the needs of public services. The existence of Pekanbaru city DPRD website is a form of technological progress in supporting the process of delivering information to the public through their own media. The first Pekanbaru city DPRD website was inaugurated in 2013 with the domain name <http://dprd-pekanbarukota.go.id>. Many benefits from the use of the website, but the current phenomenon, where the Pekanbaru city DPRD website has not been updated since 2014-2016

This type of research uses qualitative method. The determination of research subjects and informants using purposive techniques. In this study which became the researcher informant is Kabag. Public relations, Kasubag. Aspirations & information technology, public relations staff and representatives of legislators Pekanbaru city. While the object of this study is the implementation of the DPRD website in publicizing the activities of members of parliament pekanbaru city. Data collection techniques in this research is done through observation, interview, documentation and internet searching. The data analysis technique used in this research is using interactive model Miles and Huberman. Testing technique of data validity using triangulation tecnique.

The results of this study indicate that the city council website pekanbaru fakum because the government has decreased the budget so that it affects the operational budget, human resources are also less competent, facilities and infrastructure is absent so the 45 DPRD members and the completeness of the board can not be covered in news services. However, all efforts have been made to ensure that it is resolved, so the pekanbaru city DPRD website now runs smoothly and is always updated as a reliable informant in providing information to the public.

Keyword : Implementation, Website, Publication, Public Relation, Government

IMPLEMENTASI SITUS *WEBSITE* DPRD DALAM MEMPUBLIKASIKAN AKTIVITAS ANGGOTA DPRD KOTA PEKANBARU

M. Eka Prasetya Hsb
m.ekaprasetyahsb@yahoo.com

Dosen Pembimbing:
Genny Gustina Sari, M.Si.,M.I.Kom

Jurusan Ilmu Komunikasi – Hubungan Masyarakat
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Website merupakan halaman situs sistem informasi yang dapat diakses secara cepat. Penting bagi pemerintah daerah untuk menyediakan situs *website* yang dapat memenuhi kebutuhan layanan publik. Keberadaan *website* DPRD Kota Pekanbaru merupakan suatu bentuk kemajuan teknologi dalam mendukung proses penyampaian informasi dewan kepada masyarakat melalui medianya sendiri. Pertama kali *website* DPRD Kota Pekanbaru diresmikan pada tahun 2013 dengan nama domain <http://dprd-pekanbarukota.go.id>. Banyak manfaat dari penggunaan *website*, namun fenomena yang terjadi saat ini, dimana *website* DPRD Kota Pekanbaru tidak terupdate sejak tahun 2014-2016.

Tipe penelitian menggunakan metode kualitatif. Penentuan subjek penelitian maupun informan menggunakan teknik *Purposive*. Pada penelitian ini yang menjadi informan peneliti adalah Kabag Humas, Kasubag Aspirasi & Teknologi Informasi, Staff Humas, dan Perwakilan Anggota DPRD Kota Pekanbaru. Sedangkan Objek dari penelitian ini adalah Implementasi Situs *Website* DPRD dalam mempublikasikan aktivitas anggota DPRD Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan internet searching. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Tehnik pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa situs *website* DPRD Kota Pekanbaru fakum karena pemerintahan mengalami penurunan APBD, sehingga berpengaruh terhadap Anggaran Operasional, tenaga SDM juga kurang berkompeten, sarana dan prasarana tidak memadai sehingga 45 anggota DPRD dan kelengkapan Dewan terkadang tidak bisa tercover dalam pelayanan pemberitaannya. Namun sudah dilakukan segala upaya agar masalah tersebut teratasi, sehingga *website* DPRD Kota Pekanbaru kini sudah berjalan dengan lancar dan selalu terupdate sebagai informan yang dapat diandalkan dalam memberikan informasi kepada publik.

Kata kunci : Implementasi, Website, Publikasi, Humas, Pemerintahan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang sedang berusaha mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* sendiri adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. (Arista, 2015:1).

Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang efektif, hal ini seiring dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak media yang bisa dijadikan alat oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Salah satu cara untuk memberikan layanan *e-government* kepada masyarakat yaitu berupa *website* Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan layanan Elektronik (*E-service*), dimana memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, layanan dan lain-lain.

Website merupakan halaman situs sistem informasi yang dapat diakses secara cepat. *Website* ini didasari dari adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Adanya penggunaan *website* pada suatu instansi pemerintahan dalam penyampaian informasi tidak terjadi begitu saja tanpa adanya peran seseorang atau divisi dalam pengelolannya. Pengelolaan *website* untuk menyampaikan informasi kepada khalayak biasanya dilakukan *Public Relations* atau Hubungan Masyarakat (Humas). Keberadaan Humas di instansi milik pemerintah merupakan keharusan dalam upaya menyebarkan atau untuk mempublikasikan tentang sesuatu kegiatan atau informasi instansi bersangkutan yang ditujukan untuk masyarakat luas.

Situs *website* membuat informasi, komunikasi, dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah dapat dilakukan via internet. Sehingga ada beberapa manfaat yang dihasilkan seperti misalnya, komunikasi dalam sistem administrasi berlangsung dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Artinya, pelayanan pemerintah pada masyarakat menjadi sangat cepat, service dan informasi dapat disediakan 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, bahkan mobile dimanapun tanpa harus hadir secara langsung.

Penting bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk menyediakan situs *website* yang dapat memenuhi kebutuhan layanan publik. Hal ini diwujudkan dengan pembuatan situs resmi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di kota Pekanbaru.

Keberadaan *website* DPRD Kota Pekanbaru merupakan suatu bentuk kemajuan teknologi dalam mendukung proses penyampaian informasi dewan kepada masyarakat melalui medianya sendiri. Pertama kali *website* DPRD Kota Pekanbaru diresmikan pada tahun 2013 dengan nama domain <http://dprd-pekanbarukota.go.id>. Pada saat ini, *website* DPRD Kota Pekanbaru menyajikan informasi mengenai agenda kegiatan anggota dewan, raperda maupun perda, berita seputar kegiatan dewan, foto galeri, video kegiatan dewan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

Penggunaan *website* DPRD Kota Pekanbaru dapat mempermudah kerja Humas dan Protokol, seperti saat menginformasikan agenda kegiatan Dewan yang harus diperbaharui setiap waktu. Jika menggunakan media konvensional informasi agenda kegiatan Dewan yang disiarkan terbatas, karena

Humas dan Protokol harus menulis pada papan kegiatan yang memiliki ukuran terbatas. Adanya *website* DPRD Kota Pekanbaru yang lengkap pun dapat mempengaruhi anggaran pembiayaan yang berasal dari APBD, karena berita yang dibuat tidak harus dikirimkan manual melalui pos atau hanya sekedar dipajang di majalah dinding. Jika press release dimuat pada majalah dinding yang tentunya memerlukan banyak tempat untuk memajangkannya, karena banyaknya kegiatan yang dilakukan anggota dewan.

Banyak manfaat dari penggunaan *website* DPRD Kota Pekanbaru, namun fenomena yang terjadi saat ini dimana pada *website* DPRD Kota Pekanbaru tidak ada berita yang terupdate pada tahun 2014-2016. Yang mana seharusnya publik mendapatkan informasi setiap saat. Dilihat dari fenomena yang terjadi, fungsi humas tidak berjalan dengan baik, karena yang mengelola *website* DPRD Kota Pekanbaru adalah bagian publikasi Humas. Peneliti melihat dari penggunaan *website* DPRD Kota Pekanbaru masih kurang sumber daya manusia yang berkompeten, baik pengelolaan *website* maupun pembuatan berita.

Dari fenomena yang terjadi, peneliti ingin melihat bagaimana implementasi situs *website* DPRD Kota Pekanbaru. Implementasi Situs *Website* adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dan penerapan dari *website* yang telah dirancang secara matang. Dan proses untuk memastikan apakah suatu kebijakan yang dibuat sudah terlaksana sehingga tujuan dari *website* sudah tercapai.

Penelitian ini memiliki sumber referensi penelitian terdahulu yang berguna menunjang pengembangan penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Menurut penelitian Dessy Arista (2015), Tantri Puspita

Yazid (Universitas Padjajaran), dan penelitian yang dilakukan oleh Santy Nurina Aprilia, Andy Fefta Wijaya, Suryadi (2015), *Website* Pemerintah telah efektif sebagai media penyampaian informasi, namun ada baiknya situs web pemerintah dikelola oleh orang yang paham tentang aturan dalam penyampaian informasi tersebut sehingga dapat diakses oleh masyarakat. Dan kurangnya sosialisasi keberadaan *website* sebagai media informasi serta pelayanan transparansi yang belum diutamakan.

Bentuk dari pemaparan diatas, fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Implementasi Situs *Website* DPRD dalam mempublikasikan aktivitas anggota DPRD Kota Pekanbaru, didukung oleh Teori *New Media* yaitu teori yang membahas mengenai perkembangan media, dimana Humas DPRD Kota Pekanbaru memanfaatkan *new media* berbasis *internet* dalam mempublikasikan aktivitas anggota DPRD Kota Pekanbaru kepada masyarakat.

Teori *New Media*

Teori media baru merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Pierre Levy, yang mengemukakan bahwa media baru merupakan teori yang membahas mengenai perkembangan media dari konvensional ke era *digital*. Dalam teori *new media*, terdapat dua pandangan yang dikemukakan oleh Levy dalam (Littlejohn, 2014: 413-414), yaitu :

1. Pandangan interaksi sosial, yang membedakan media menurut kedekatannya dengan interaksi tatap muka. Levy memandang *World Wide Web* (WWW) sebagai sebuah lingkungan informasi yang terbuka, fleksibel, dan dinamis, yang memungkinkan manusia mengembangkan orientasi

pengetahuan yang baru dan juga terlibat dalam dunia demokratis tentang pembagian mutual dan pemberian kuasa yang lebih interaktif dan berdasarkan pada masyarakat.

2. Pandangan integrasi sosial, yang merupakan gambaran media bukan dalam bentuk informasi, interaksi, atau penyebarannya, tetapi dalam bentuk ritual, atau bagaimana manusia menggunakan media sebagai cara menciptakan masyarakat. Media bukan hanya sebuah instrumen informasi atau cara untuk mencapai ketertarikan diri, tetapi menyatukan kita dalam beberapa bentuk masyarakat dan memberi kita rasa saling memiliki.

New Media merupakan media yang menggunakan internet, media *online* berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif dan dapat berfungsi secara privat maupun secara publik (Mondry, 2008:13).

Internet adalah salah satu bentuk dari media baru (*new media*). Internet dinilai sebagai alat informasi paling penting untuk dikembangkan kedepannya. Penulis menggunakan teori *new media* karena Humas DPRD Kota Pekanbaru memanfaatkan *new media* berbasis *internet* untuk mempublikasikan aktivitas anggota DPRD Kota Pekanbaru kepada masyarakat khususnya yang berada di Pekanbaru

Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci (Sutabri,2004:93)

Menurut Ahmad (2006:523) penerapan adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut atau dengan kata lain adalah melaksanakan praktek dari suatu

perancangan atau teori yang dibuat oleh seseorang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan.

Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Situs *Website* adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dan penerapan dari *website* yang telah dirancang secara matang. Dan proses untuk memastikan apakah suatu kebijakan yang dibuat sudah terlaksana sehingga tujuan dari *website* sudah tercapai.

Humas Pemerintahan

Onong Uchjana Effendy, Humas adalah komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerja sama dan pemenuhan kepentingan bersama. (Kriyantono, 2008:4)

Humas dalam instansi pemerintahan sangatlah penting sebagai komunikator, baik kedalam maupun keluar instansi. Maka dari itu sikap dan pelayanan yang baik sangat penting demi terciptanya citra yang baik. Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik menjadi tuntutan sekaligus ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan yang demokratis.

Humas Pemerintah memiliki kode etik yang harus ditegakkan yang mengacu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 371/Kep/M. Kominfo/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintahan. Kode etik humas pemerintah diantaranya ialah: anggota humas pemerintahan menjunjung tinggi kehormatan sebagai pegawai instansi pemerintah, anggota humas pemerintahan mengutamakan kompetensi. Selain itu juga humas pemerintah wajib untuk menjunjung objektivitas, kejujuran, serta menjunjung tinggi integritas dan norma-norma keahlian serta menyadari konsekuensi tindakannya, anggota

humas pemerintahan memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar sikap dan perilakunya dapat memberikan citra yang positif bagi pemerintahan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi Humas

Humas dalam mencapai tujuannya, memiliki banyak sekali fungsi, dimana fungsi-fungsi tersebut sangat penting bagi sebuah lembaga yang diwakilinya. Menurut pakar Humas Internasional, Cutlip & Center, and Canfield (1982) Fungsi Humas dapat dirumuskan, sebagai berikut: Menunjang aktifitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi), Membina hubungan yang harmonis antara badan/organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran, Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi dan tanggapan public terhadap badan atau organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya, Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama, dan Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari badan atau organisasi ke publiknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak.

Situs Website Pemerintah sebagai Media Transparasi

Enam prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (Krina, 2003:19) yaitu: (1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program), (2) Adanya publikasi dan

media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan, (3) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum, (4) Laporan tahunan, (5) Situs web atau media publikasi organisasi, (6) Pedoman dalam penyebaran informasi.

Pada poin ke-lima disebutkan bahwa pemakaian situs *website* merupakan salah satu wujud dari prinsip transparansi. Situs *website* pemerintah memberikan peluang besar bagi terciptanya inovasi dalam sektor pelayanan publik. Inovasi tersebut perlu didifusikan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Inovasi itu sendiri adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit lain adopsi.

Penulis dalam penelitian ini, akan meneliti situs *website* pemerintah daerah khususnya di kota Pekanbaru. Penelitian menitik beratkan sejauh mana pengimplementasian situs *website* pemerintah kota Pekanbaru.

Publikasi

Informasi adalah berbagai macam berita, materi yang berisikan riwayat, berbagai kegiatan, fungsi, cara kerja lengkap yang harus diketahui oleh orang lain/masyarakat (Anggoro, 2002: 222).

Salah satu kegiatan Humas adalah publikasi. Publikasi itu sendiri adalah kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat luas tentang hasil produksi atau jasa perusahaan/lembaga. Dengan publikasi dapat menghasilkan suatu citra dan itu berhubungan dengan informasi yang memadai yang diperoleh publik (Widjaja, 2000: 42).

Publikasi biasa menggunakan jalur-jalur mana yang akan dipilih. Dan jalur-jalur publikasi tersebut adalah: (1) Media Cetak: Koran Media berkala, Jurnal intern, Laporan tahunan, Surat

kabar & khusus, (2) Media Elektronik: Radio, Televisi, Film, Media Sosial, (3) Komunikasi antar pribadi: pertemuan, ceramah, Konferensi, Seminar, (4) Peragaan: Pameran, Poster, Iklan, (5) Acara-acara khusus: jumpa pers, pertemuan umum (Oxley, 2000:96)

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Bogdan & Taylor (2000), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Data kualitatif diperoleh dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti observasi (pengamatan), wawancara, menggambar, diskusi kelompok terfokus, dan lain-lain. (dalam Moleong, 2005: 5).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Situs Website DPRD Kota Pekanbaru

Implementasi situs *Website* adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dan penerapan dari *website* yang telah dirancang secara matang, dan proses untuk memastikan apakah suatu kebijakan yang dibuat sudah terlaksana sehingga tujuan dari *website* sudah tercapai. Situs *website* pemerintah memungkinkan terjadinya interaksi antara pemerintah dengan masyarakat tanpa melalui tatap muka. Dengan demikian, hambatan-hambatan seperti keterlambatan pemberian informasi, pemungutan biaya dan hal teknis lainnya dapat diminimalisir, atau bahkan ditiadakan. Seperti yang dikatakan oleh informan kepada peneliti, *website* sangat membantu: “*Website* itu sangat membantu untuk

menyebarkan informasi. Sekarang trennya kan melalui internet, seperti yang kita ketahui penggunaan internet sudah cukup banyak. Oleh karena itu *website* banyak membantu Humas, tapi perlu ditingkatkan mengenai konten maupun tampilannya” (Wawancara dengan bapak Dewandono selaku Kabag. Protokol dan Publikasi DPRD Pekanbaru, 08 May 2017)

Penuturan oleh informan diatas sesuai dengan penjelasan mengenai pentingnya bagi pemerintah daerah memiliki situs *website*, hal ini mengingat penggunaan internet yang semakin besar di masyarakat yang dapat diakses oleh masyarakat luas dan juga *website* terhubung secara internal DPRD yang dapat memudahkan. Salah satunya sebagai media komunikasi dan informasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Berikut penuturan oleh informan kepada peneliti :

“Pastinya sangat penting, karena *website* dapat membantu kerja Humas. Dan yang terpenting adalah masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat berkenaan dengan aktivitas legislative. Apakah itu berupa pengawasan pembentukan Perda maupun Budgeting. Kita berharap dari adanya *website* DPRD, masyarakat tidak memandang negative anggota dewan, karena semua sudah kita informasikan agar pemerintahan Kota Pekanbaru menjadi pemerintahan yang transparan” (Wawancara dengan bapak Dewandono selaku Kabag. Protokol dan Publikasi DPRD Pekanbaru, 08 May 2017)

Saat ini DPRD Kota Pekanbaru telah berupaya menjadi pemerintahan yang transparan. Salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu adanya Situs Website di DPRD Kota Pekanbaru yang sudah berjalan sejak tahun 2013 hingga saat ini, dengan alamat domain <http://dprd-pekanbarukota.go.id>. Humas DPRD Kota Pekanbaru sudah melakukan berbagai macam upaya

dalam mengimplementasikan website ini, Berikut penuturan oleh informan kepada peneliti:

“Implementasi situs *website* DPRD Kota Pekanbaru dengan mengupdate seluruh berita terkini, rapat Paripurna, menampung Aspirasi masyarakat, rencana Raperda, menyampaikan segala informasi tanpa terlewatkan satupun. Segala macam cara sudah dilakukan agar situs *website* dapat berjalan dengan baik dalam memberikan informasi kepada masyarakat” (Wawancara dengan ibu Yessy selaku Staff Humas DPRD Pekanbaru, 04 May 2017)

Implementasi situs *website* DPRD tidak hanya dengan mengupdate aktifitas DPRD Kota Pekanbaru maupun memberikan informasi terkini, namun humas juga harus mensosialisasikan situs website tersebut kepada masyarakat maupun anggota DPRD itu sendiri.

“Setau saya Humas sudah melakukan sosialisasi tentang *website* ini, mereka menyampaikan informasi mengenai situs ini lewat anggota dewan masing-masing” (Wawancara dengan bapak Sigit selaku Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Fraksi Demokrat, 09 May 2017)

Anggota DPRD membenarkan bahwa humas sudah melakukan sosialisasi terkait situs website pemerintah, namun masih harus dimaksimalkan lagi agar dapat tersampaikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan penuturan informan berikut:

“kalau sosialisasi pernah, tapi sosialisasi yang dilakukan masih kurang karena hanya disampaikan secara lisan bahwa kita sudah punya *website* DPRD” (Wawancara dengan bapak Ruslan selaku Anggota DPRD Pekanbaru Fraksi PDIP, 09 May 2017)

Humas DPRD diharapkan berkompeten dalam menjalankan publisitas, terutama dalam upaya implementasi situs

website. Hal ini dikarenakan, Humas dalam upaya menyelenggarakan komunikasi timbal balik antara organisasi dengan publiknya tersebut dapat menentukan sukses tidaknya usaha organisasi dalam upaya meraih citra positif. Pada dasarnya Humas DPRD Kota Pekanbaru sudah diupayakan untuk menjalankan publisitas dengan baik, Hal ini sesuai dengan penuturan informan berikut:

“Humas DPRD Kota Pekanbaru sampai saat ini sudah menjalankan publisitas dengan baik. Baik media elektronik maupun cetak dalam penyampaian informasi kepada masyarakat” (Wawancara dengan bapak Norman selaku Kasubag. anspirasi dan teknologi informasi DPRD Pekanbaru, 04 May 2017)

Staff Humas dan beberapa anggota dewan membenarkan bahwa Humas DPRD Kota Pekanbaru sudah menjalankan publisitas dan implementasi situs website dengan baik. Namun, ada pula beberapa Staff maupun anggota Dewan yang memang belum mengakui hal tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh informan berikut: “Peran humas sih masih minim, mungkin karena perilaku yang bertanggung jawab mengelola *website* DPRD Kota Pekanbaru kurang baik. Humas kurang kreatif dalam menyampaikan berita yang positif” (Wawancara dengan bapak Ruslan selaku Anggota DPRD Pekanbaru Fraksi PDIP, 09 May 2017)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kabag. Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru, beliau membenarkan bahwa Humas masih harus belajar dalam mengikuti perkembangan yang terjadi. Berikut pemaparan informan kepada peneliti:

“Kalau dibilang baik pasti masih harus belajar, agar kekurangan kita bisa teratasi. Ilmu tentang publisitas

berkembang terus, kita harus mengikuti setiap perkembangan yang terjadi. Karena itu tidak bisa kita katakan sudah baik. Yang belum terlaksana baik itu saat ini adalah kurangnya staff yang berkompeten, anggaran masih harus ditambah dalam arti masih minim, sarana prasarana harus dilengkapi, pendidikan mengenai keahlian publisitas maupun formal harus lebih baik agar lebih berkualitas” (Wawancara dengan bapak Dewandono selaku Kabag. Protokol dan Publikasi DPRD Pekanbaru, 08 May 2017)

Hasil observasi, penulis memang mendapatkan bahwa tahapan dan peran humas sebagai mediator belum dilaksanakan dengan maksimal. Tahapan dan hal-hal yang terjadi dilapangan sangatlah berbeda. Dari penuturan semua informan diatas, jelas bahwa sudah dilakukan segala upaya dalam implementasi situs *website* DPRD Kota Pekanbaru, namun tidak hanya upaya implementasinya saja yang harus dicapai. Seluruh Staff Humas DPRD juga harus berkompeten dalam menjalankan publisitas, terutama dalam upaya implementasi situs *website*.

Hambatan Yang Dihadapi Humas Dalam Implementasi Situs Website DPRD Kota Pekanbaru

Di era keterbukaan sekarang ini, Humas mempunyai peran yang sangat penting. Posisi Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi. Untuk mendukung kinerja-kinerja DPRD Kota Pekanbaru, maka humas sangat diharapkan mampu menghadapi segala persoalan dan tudingan mengenai kinerja yang tidak telalu baik ketika berhubungan secara vertikal dengan masyarakat. Beberapa upaya dalam menyampaikan informasi yang menyangkut tentang anggota dan secretariat DPRD Kota Pekanbaru adalah mendokumentasikan segala

kegiatan yang terjadi, yang telah dijelaskan oleh informan berikut ini:

“salah satunya setiap kegiatan di DPRD Kota Pekanbaru ini baik rapat Paripurna, rapat kerja, kunjungan lapangan, kegiatan pansus selalu kami dokumentasikan” (Wawancara dengan ibu Yessy selaku Staff Humas DPRD Pekanbaru, 04 May 2017)

Dari upaya yang sudah dilakukan, ada beberapa hambatan yang ditemui humas dalam implementasi situs *website*, mulai dari hambatan implementasinya itu sendiri maupun hambatan dalam proses sosialisasi *website* DPRD di publik maupun internal. proses sosialisasi yang dilakukan berjalan dengan lancar, namun jumlah staff humas tidak memadai.

“dalam proses sosialisasi sih lancar aja, tapi memang anggota staff humas tidak sebanding dengan jumlah anggota DPRD Kota Pekanbaru” (Wawancara dengan bapak Norman selaku Kasubag. anspirasi dan teknologi informasi DPRD Pekanbaru, 04 May 2017)

Kurangnya jumlah staff humas berpengaruh terhadap kelancaran situs *website* DPRD Kota Pekanbaru. Masyarakat maupun pihak internal pemerintahan masih tidak mengetahui manfaat dari situs *website* karena informasi yang diterima masih kurang dan belum maksimal. Fenomena yang terjadi saat ini dimana pada *website* DPRD Kota Pekanbaru tidak ada berita yang terupdate pada tahun 2014-2016. Yang mana seharusnya publik mendapatkan informasi setiap saat. Dari fenomena yang terjadi, sebab fakumnya *website* telah dipaparkan oleh informan, sebagai berikut:

“semua terjadi terkait karena sumber daya manusianya itu sendiri” (Wawancara dengan ibu Yessy selaku Staff Humas DPRD Pekanbaru, 04 May 2017)

Tidak hanya sumber daya manusia yang menyebabkan fakumnya website DPRD Kota Pekanbaru, namun anggaran operasional juga berpengaruh terhadap kelancaran website itu sendiri. Berikut penuturan informan kepada peneliti:

“Untuk tahun-tahun sebelumnya, pemerintahan Kota Pekanbaru secara keseluruhannya mengalami penurunan APBD, dengan demikian berpengaruh dengan Anggaran Operasional. Karena itu *website* DPRD Kota Pekanbaru tidak berjalan sebagaimana mestinya” (Wawancara dengan bapak Dewandono selaku Kabag. Protokol dan Publikasi DPRD Pekanbaru, 08 May 2017)

Dari pemaparan beberapa informan diatas, kita sudah mengetahui sedikit mengapa website DPRD Pekanbaru fakum. Namun tidak hanya sampai disana, Humas juga menemukan beberapa hambatan dalam implementasi situs website yang menyebabkan kinerja humas tidak maksimal, berikut ini adalah paparan wawancara yang peneliti lakukan mengenai hambatan dalam implementasi situs *website*:

“Hambatan yang ditemui itu kurangnya tenaga SDM yang berkompeten dalam mengelola *website* dan tidak tersedianya anggaran untuk *website*. Jadi *website* DPRD Kota Pekanbaru masih belum maksimal” (Wawancara dengan bapak Norman selaku Kasubag. anspirasi dan teknologi informasi DPRD Pekanbaru, 04 May 2017)

Penuturan informan diatas diperkuat dengan pernyataan sama yang disampaikan staff humas lainnya. berikut penuturan informan kepada peneliti:

“Kurangnya SDM, sarana dan prasarana sehingga 45 anggota DPRD dan kelengkapan Dewan terkadang tidak bisa tercover dalam pelayanan pemberitaannya” (Wawancara dengan bapak Dewandono selaku Kabag.

Protokol dan Publikasi DPRD Pekanbaru, 08 May 2017)

Pembentukan, pemeliharaan dan peningkatan citra dan reputasi positif juga harus didukung kebijakan dan komitmen pimpinan puncak. Dilihat dari sarana yang disediakan, staff humas hanya menjalankan dari apa yang sudah disediakan, diluar terkait masalah SDM yang kurang berkompeten.

Cara Menyelesaikan Hambatan Yang Dihadapi Humas Dalam Implementasi Situs Website DPRD Kota Pekanbaru

Dari wawancara kepada para informan, diketahui beberapa langkah yang telah dilakukan untuk menyelesaikan hambatan yang dihadapi humas dalam implementasi situs website DPRD Kota Pekanbaru. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas SDM agar memiliki potensi dalam implementasi situs website.

“dengan menyediakan sumber daya manusia yang berpotensi serta jaringan wifi yang baik” (Wawancara dengan ibu Yessy selaku Staff Humas DPRD Pekanbaru, 04 May 2017)

Segala macam cara sudah diperjuangkan agar website ini aktif kembali. seperti yang telah dituturkan oleh informan berikut ini:

“pokoknya segala macam cara sudah diperjuangkan, agar website aktif kembali pada tahun 2017 ini. Dan Alhamdulillah semua sudah teratasi dan harapan kami sebagai staff humas semoga website ini semakin lancar” (Wawancara dengan bapak Norman selaku Kasubag. anspirasi dan teknologi informasi DPRD Pekanbaru, 04 May 2017)

Selain staff humas, bapak kabag. Protokol dan publikasi DPRD kota Pekanbaru pun sudah menjalankan beberapa langkah untuk mengatasi hambatan yang ditemui dalam implementasi situs website DPRD Kota

Pekanbaru dalam mempublikasikan aktivitas anggota DPRD, yang di paparkan oleh informan sebagai berikut ini:

“Saya sudah mengusulkan dan mengupayakan penambahan petugas, penambahan anggaran operasional, penambahan infrastruktur, serta mendorong peningkatan kompetensi untuk petugas agar staff humas dapat meningkatkan kompetensi dan *website* DPRD dapat berjalan dengan lancar dalam memberikan informasi ke masyarakat” (Wawancara dengan bapak Dewandono selaku Kabag. Protokol dan Publikasi DPRD Pekanbaru, 08 May 2017)

Penuturan informan diatas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh staff humas, bahwa Kabag. Sudah melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan hambatan yang terjadi. “memaksimalkan pegawai yang ada, dan meminta bantuan dari rekan-rekan wartawan” (Wawancara dengan ibu Yessy selaku Staff Humas DPRD Pekanbaru, 04 May 2017)

Sudah banyak kontribusi dan solusi yang diberikan Kabag. dalam penyelesaian hambatan yang terjadi. Berikut penuturan informan kepada peneliti:

“Langkah yang udah diambil Kabag. Salah satunya dengan menyiapkan SDM yang berkompeten serta mempersiapkan anggaran untuk *website* DPRD Kota Pekanbaru. Sudah banyak kontribusi dan solusi yang diberikan Kabag. dalam menyelesaikan hambatan tersebut” (Wawancara dengan bapak Norman selaku Kasubag. aspirasi dan teknologi informasi DPRD Pekanbaru, 04 May 2017)

Langkah yang sudah dilakukan oleh Kabag. Maupun Staff Humas tidak terlepas dari peran Anggota DPRD itu sendiri. Humas juga membutuhkan saran dari Anggota DPRD untuk mengatasi hambatan yang ditemui. “Ya kita perlu

mendapatkan saran dari anggota DPRD, karena pada prinsipnya Humas juga sebagai penunjang terhadap kinerja DPRD Kota Pekanbaru” (Wawancara dengan bapak Dewandono selaku Kabag. Protokol dan Publikasi DPRD Pekanbaru, 08 May 2017)

Hal serupa juga dirasakan oleh informan lainnya, dimana setiap langkah yang dilakukan tidak terlepas dari saran-saran anggota DPRD lainnya, seperti yang dituturkan oleh informan berikut:

“Perwakilan Anggota DPRD selalu memberikan saran, agar Humas lebih mudah dalam menyelesaikan hambatan yang dihadapi” (Wawancara dengan bapak Norman selaku Kasubag. aspirasi dan teknologi informasi DPRD Pekanbaru, 04 May 2017)

Banyak saran yang sudah didapatkan humas dari beberapa Anggota DPRD, salah satunya yaitu humas harus lebih kreatif, responsive, dan selektif dalam menyampaikan berita ke masyarakat melalui *website*. Berikut penuturan Informan:

“Humas harus lebih kreatif, responsive, dan selektif dalam menyampaikan berita ke masyarakat melalui *website* ini. Agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari *website*. Kan kalau *websitenya* juga cuma hanya kasih gambaran umum tentang DPRD percuma juga, masyarakat itu maunya informasi lengkap baru dia mau buka *websitenya*. Kalau gak lengkap jadi ogah-ogahan, karena gak ada informasi yang mereka dapatkan” (Wawancara dengan bapak Ruslan selaku Anggota DPRD Pekanbaru Fraksi PDIP, 09 May 2017)

Apapun bentuk kegiatan yang dilakukan, mulai dari hal-hal kecil seperti turun kelapangan, masyarakat demo seperti ini harus sudah masuk di *website* maupun media lainnya. “Masukan dari saya, apapun bentuknya kegiatan DPRD Kota Pekanbaru harus

sudah masuk di *website* maupun media lainnya. Contohnya Paripurna, Aspirasi masyarakat, rencana Raperda, agar semuanya sudah tersedia dan hal-hal kecil dapat tersampaikan dengan baik. Salah satunya turun kelapangan, masyarakat demo itu juga harus disampaikan di *website* DPRD Kota Pekanbaru” (Wawancara dengan bapak Sigit selaku Anggota DPRD Pekanbaru Fraksi Demokrat, 09 May 2017)

Saran dan kepedulian yang diberikan Anggota DPRD, diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja para staff dan aktivitas staff dapat lebih lancar pelaksanaannya dalam memberikan informasi kepada publik tanpa adanya hambatan yang muncul akibat tidak efektifnya aktivitas humas.

Pembahasan

Peneliti melakukan pembahasan mengenai bagaimana implementasi *website*, apa saja hambatan yang dihadapi Humas, serta bagaimana Humas menyelesaikan hambatan yang dihadapinya. Dari realitas yang ada dalam fenomena implementasi situs *website* yang peneliti dapat dari beberapa informan, ditemukan bahwa penggunaan *website* sebagai salah satu kegiatan *Public Relations on the net* merupakan sesuatu hal yang baru dan menjadi suatu kasus unik di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru. Karena banyaknya manfaat dari penggunaan *website*, Namun humas DPRD Kota Pekanbaru tidak memanfaatkan dengan baik. Masalah tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana “Implementasi Situs *Website* DPRD dalam mempublikasikan aktivitas anggota DPRD Kota Pekanbaru”.

Pembahasan penelitian ini tidak lepas dari konsep implementasi dan publikasi, serta teori yang digunakan dalam memandu hasil penelitian ini, yakni Teori New Media oleh Pierre

Levy. Penulis menggunakan teori *new media* karena Humas DPRD Kota Pekanbaru memanfaatkan *new media* berbasis *internet* yaitu *website* untuk mempublikasikan aktivitas anggota DPRD Kota Pekanbaru kepada masyarakat khususnya yang berada di Pekanbaru.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru sebagai badan publik sudah melakukan implementasi situs *website* dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas anggota DPRD. Dari konsep implementasi itu sendiri menjelaskan bahwa Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi ini dilakukan karena *website* sangat membantu humas dalam memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat. Dan situs *website* ini dapat memberikan citra positif pemerintah dikalangan masyarakat, sehingga masyarakat melihat bahwa pemerintahan kota pekanbaru sudah menjadi pemerintahan yang transparan.

Humas DPRD Kota Pekanbaru sudah melakukan banyak macam upaya dalam mengimplementasikan *website* ini. Informasi tentang tugas pokok, fungsi DPRD dan kesekretariatan, rapat paripurna, rencana raperda, berita-berita terkini serta aspirasi masyarakat pun sudah diberikan kepada publik. Tidak hanya itu, humas juga sudah melakukan sosialisasi agar *website* ini benar-benar bisa bermanfaat untuk publik.

Dari penuturan beberapa informan, Humas DPRD Kota Pekanbaru sampai saat ini sudah menjalankan publisitas dengan baik. Baik media elektronik maupun cetak dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun realita yang terlihat pada *website* DPRD Kota Pekanbaru tidak ada berita yang terupdate pada tahun 2014-2016, sehingga beberapa

Staff maupun anggota Dewan yang masih menganggap peran humas masih minim dalam mengelola website ini. Pernyataan beberapa staff tersebut dikuatkan dengan paparan Kabag. Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru, beliau membenarkan bahwa Humas masih harus belajar dalam mengikuti perkembangan yang terjadi maupun menambah pendidikan mengenai keahlian publisitas maupun formal agar lebih berkualitas.

Dari realita yang peneliti temui jelas bahwa sudah dilakukan segala upaya dalam implementasi situs *website* DPRD Kota Pekanbaru, namun tidak hanya upaya implementasinya saja yang harus dicapai. Seluruh Staff Humas DPRD juga harus berkompeten dalam menjalankan publisitas, terutama dalam upaya implementasi situs *website*. Tahapan dan peran humas sebagai mediator belum dilaksanakan dengan maksimal. Tahapan dan hal-hal yang terjadi dilapangan sangatlah berbeda.

Sudah beberapa upaya dilakukan agar kinerja humas dapat berjalan dengan baik, terutama dalam publisitas melalui implementasi situs *website* DPRD Kota Pekanbaru. Namun, ada beberapa hambatan yang ditemui humas dalam implementasi situs *website*, sehingga situs *website* DPRD Kota Pekanbaru tidak berjalan dengan lancar pada tahun 2014-2016.

Informan menjelaskan bahwa hambatan itu terjadi karena tahun-tahun sebelumnya, pemerintahan Kota Pekanbaru secara keseluruhannya mengalami penurunan APBD, dengan demikian berpengaruh terhadap Anggaran Operasional. Karena rasionalisasi terhadap anggaran tersebut *website* DPRD Kota Pekanbaru fakum.

Selain karena anggaran yang tidak mencukupi, tenaga SDM juga kurang berkompeten dalam mengelola *website*, sarana dan prasarana seperti jaringan

wifi, jumlah anggota SDM tidak memadai sehingga 45 anggota DPRD dan kelengkapan Dewan terkadang tidak bisa tercover dalam pelayanan pemberitaannya.

Humas pemerintahan DPRD Kota Pekanbaru masih banyak terkendala, masih banyak masalah utama yang harus segera dibenahi. Baik dari Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur pendukung kinerja dan perhatian yang mendalam atas kualifikasi aparat humas, sistem jenjang karir dan humas sebagai juru bicara pemerintah harusnya dapat di realisasikan dengan nyata.

Seringnya ditemui masalah mengenai kebijakan yang diambil oleh humas, ditanggapi salah oleh masyarakat. Ini terjadi karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait dengan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk itu sangat diperlukan penyampaian pesan yang baik, dan humas seharusnya mampu memfasilitasinya.

Informan mengatakan sudah banyak dilakukan perbaikan untuk menyelesaikan hambatan yang dihadapi humas dalam implementasi situs *website*. Kabag. Sudah mengambil tindakan dan sudah berkontribusi banyak, seperti mengusulkan dan mengupayakan penambahan petugas, penambahan anggaran operasional, penambahan infrastruktur, serta mendorong peningkatan kompetensi untuk petugas agar staff humas dapat meningkatkan kompetensi.

Semua itu dilakukan agar humas lebih kreatif, responsive, dan selektif dalam menyampaikan berita ke masyarakat melalui *website* ini. Agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari *website* itu sendiri. Penyelesaian hambatan yang dilakukan berkaitan dengan kode etik Humas Pemerintah yang harus ditegakkan, yang mengacu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

371/Kep/M.Kominfo/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintahan. Semua upaya yang telah dilakukan humas maupun seluruh anggota pemerintahan kini sudah cukup berhasil, yang dapat kita lihat di website DPRD itu sendiri sekarang sudah berjalan dengan lancar dan selalu terupdate dalam memberikan informasi kepada publik. Banyak harapan masyarakat maupun pihak internal agar website DPRD Kota Pekanbaru tetap menjadi informan yang dapat diandalkan dalam memberikan informasi.

Kesimpulan

1. Humas DPRD Kota Pekanbaru sudah melakukan segala upaya dalam implementasi situs *website* DPRD Kota Pekanbaru, seperti memberikan informasi tentang tugas pokok, fungsi DPRD dan kesekretariatan, rapat paripurna, rencana raperda, berita-berita terkini serta aspirasi masyarakat pun sudah diberikan kepada publik. Tidak hanya itu, humas juga sudah melakukan sosialisasi agar website ini benar-benar bisa bermanfaat untuk publik.
2. Namun, ada beberapa hambatan yang ditemui humas dalam implementasi situs *website*, sehingga situs *website* DPRD Kota Pekanbaru tidak berjalan dengan lancar pada tahun 2014-2016. Informan menjelaskan bahwa hambatan itu terjadi karena tahun-tahun sebelumnya, pemerintahan Kota Pekanbaru secara keseluruhannya mengalami penurunan APBD, dengan demikian berpengaruh terhadap Anggaran Operasional. Karena rasionalisasi terhadap anggaran tersebut *website* DPRD Kota Pekanbaru fakum. Selain karena anggaran yang tidak mencukupi, tenaga SDM juga kurang berkompeten dalam

mengelola *website*, sarana dan prasarana seperti jaringan wifi, infrastruktur pendukung kinerja dan perhatian yang mendalam atas kualifikasi aparat humas, sistem jenjang karir humas sebagai juru bicara pemerintah harusnya dapat di realisasikan dengan nyata, dan juga jumlah anggota SDM tidak memadai sehingga 45 anggota DPRD dan kelengkapan Dewan terkadang tidak bisa tercover dalam pelayanan pemberitaannya.

3. Adapun Kabag. Sudah mengambil tindakan dan sudah berkontribusi banyak, seperti mengusulkan dan mengupayakan penambahan petugas, penambahan anggaran operasional, penambahan infrastruktur, serta mendorong peningkatan kompetensi untuk petugas agar staff humas dapat meningkatkan kompetensi. Semua upaya yang telah dilakukan kini sudah cukup berhasil, yang dapat kita lihat di website DPRD itu sendiri sekarang sudah berjalan dengan lancar dan selalu terupdate dalam memberikan informasi kepada publik. Banyak harapan masyarakat maupun pihak internal agar website DPRD Kota Pekanbaru tetap menjadi informan yang dapat diandalkan dalam memberikan informasi.

Saran

Adapun saran yang bisa peneliti berikan di dalam penelitian ini adalah:

1. Humas harus lebih kreatif dan selektif dalam menyampaikan berita ke masyarakat melalui *website* ini. Agar informasi yang disampaikan selalu terupdate dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari *website* itu sendiri.
2. Infrastruktur humas harus lebih diperhatikan lagi, seperti jaringan wifi, anggaran operasional, dan

SDM yang berkompeten. Agar staff humas dapat meningkatkan kompetensi dalam implementasi situs website DPRD Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Faisal Ali. 2006. *Hubungan Penerapan Absensi Sidik Jari (Finger Print) Dengan Motivasi dan Kinerja Karyawan*. Skripsi. Bogor. FMIPA IPB.
- Arista, Dessy. 2015. *Transparansi Informasi Situs Web Pemerintah Daerah Di Sulawesi Selatan Sebagai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik*.
- Anggoro, M. Linggar. 2002. *Teori Dan Profesi Kehumasan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bogdan. dan Taylor. 2000. Dalam Maleong. *Metode Penelitian*, hlm. 3. Carbondale: Southern Illiona University Pers
- Effendi, Onong Uchjana. 1993. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi. Komunikasi Pemasaran*. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group.
- Mondry. 2008 *Pemahaman Teori dan Praktek Jurnalistik*. Penerbit: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J., 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Edisi Revisi, Penerbit PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. "Metode Penelitian Kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990
- Oxley, Hendry. 2000. *Publik Relation Dalam Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sutabari, Tata. 2004. *Analisa Sistem Informasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi.
- Widjaya 2000. *Public Relation*. Jakarta: Bumi aksara.
- Yazid, Tantri Puspita. *Implementasi Cyber Publik Relation Melalui Pengelolaan Website Pemerintah Provinsi Sumatra Barat*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 6, Nomor 2 Tahun 2015, Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Riau.